

## PARTISIPASI STAKEHOLDER DALAM KONSERVASI TUNTONG LAUT DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

*(Stakeholder Participation of Painted Terrapin Conservation in District Aceh Tamiang)*

ENDANG HERNAWAN<sup>1)</sup>, SAMBAS BASUN<sup>2)</sup>, BURHANUDDIN MASY'UD<sup>3)</sup>, DAN MIRZA DIKARI KUSRINI<sup>4)</sup>

<sup>1)</sup>Balai Pendidikan dan Lingkungan Hidup Pematangsiantar, Jalan Bali No 12, Pematangsiantar, Kode Pos 41142

<sup>2,3,4)</sup> Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor

Alamat : Jalan Lingkar Akademik Kampus IPB Dramaga, Kecamatan Dramaga, Bogor, Kode Pos 16001

Email : [endang\\_sah@yahoo.com](mailto:endang_sah@yahoo.com)

Diterima 21 Agustus 2018 / Disetujui 21 Desember 2018

### ABSTRACT

*Painted Terrapin (Batagur borneoensis Schlegel and Muller 1845) conservation in the coastal area of Aceh Tamiang Regency faces difficulties because it involves many stakeholder. The objective of this study were to analyze stakeholder interest, influences and describe the relationship among stakeholder in the conservation of Batagur borneoensis at Aceh Tamiang District. The study was conducted in Aceh Tamiang District and respondents were selected using purposive sampling method. The data obtained using questionnaire, interview, and direct observation were analyzed with stakeholder classification matrix, stakeholder interaction matrix and descriptive analysis. The results showed that there are twenty-seven stakeholder involved in the conservation of Batagur borneoensis which can be categorized as subjects, key players, context setters, and crowds. To achieve the management objectives of Batagur borneoensis conservation, stakeholder engagement needs to be improved through collaboration among key players, participation all key stakeholder, and community empowerment.*

**Keywords:** *Batagur borneoensis, collaboration, conservation, stakeholder analysis*

### ABSTRAK

*Konservasi tuntong laut (Batagur borneoensis Schlegel and Muller 1845) di daerah pesisir Kabupaten Aceh Tamiang menghadapi tantangan yang berat karena menyangkut banyak pemangku kepentingan (stakeholder). Studi ini bertujuan menganalisis kepentingan, pengaruh, dan hubungan antar stakeholder dalam konservasi tuntong laut di Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang dengan pemilihan responden menggunakan metode purposive sampling. Data yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner, wawancara, dan observasi langsung dianalisis dengan menggunakan matriks klasifikasi stakeholder, matriks interaksi stakeholder, dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua puluh tujuh stakeholder yang terlibat dalam konservasi tuntong laut yang dapat dikategorikan sebagai subjects, key players, context setters, dan crowds. Untuk mencapai tujuan pengelolaan konservasi tuntong laut, keterlibatan stakeholder perlu ditingkatkan melalui kolaborasi di antara key players, partisipasi semua stakeholder key player, dan pemberdayaan masyarakat.*

**Kata kunci:** *analisis stakeholder, Batagur borneoensis, kerjasama, konservasi*

### PENDAHULUAN

Tuntong laut (*Batagur borneoensis Schlegel and Muller 1845*) merupakan kura-kura yang hidup di ekosistem mangrove. Tuntong laut merupakan reptil yang memiliki peran ekologis penting sebagai penyebar biji tumbuhan mangrove, khususnya *Sonneratia* sp. Kura-kura ini merupakan salah satu jenis kura-kura air tawar berukuran besar yang sebaran alaminya hanya dijumpai secara terbatas di Asia Tenggara. Berdasarkan peta penyebarannya yang dibuat oleh Van Dijk *et.al* (2000), tuntong laut diketahui terdapat di Selatan Thailand, pantai bagian Timur Sumatera, pantai bagian Barat dan Selatan Kalimantan, Sabah, Serawak dan Brunei.

Dalam status keterancaman yang dikeluarkan oleh IUCN (*International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*) tahun 1996, tuntong laut ditetapkan sebagai salah satu jenis satwa dengan status

*Critically Endangered* (CE) karena telah terjadi penurunan populasi yang sangat signifikan mencapai 80% selama 10 tahun atau tiga generasi (IUCN 2014). Berdasarkan status perdagangan internasional, sejak tahun 1997 tuntong laut dimasukkan ke dalam Appendix II CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) (IUCN 2014).

Di wilayah pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang merupakan satu-satunya wilayah penyebaran tuntong laut yang bersifat terbatas, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah menetapkan tuntong laut sebagai satwa yang dilindungi melalui Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelestarian Tuntong Laut, dan Keputusan Bupati Aceh Tamiang No. 63 Tahun 2014 Tentang Penetapan Spesies Tuntong Laut sebagai Satwa Dilindungi di Kabupaten Aceh Tamiang.

Dalam konservasi tuntong laut di Kabupaten Aceh Tamiang terlibat banyak *stakeholder* tetapi setiap *stakeholder* hanya melakukan kegiatan sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Sebagai contoh, sejak ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi di Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2014, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang telah menetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang 2012-2031 fungsi ruang Suaka Alam Perairan seluas 981,70 ha. Pada saat yang bersamaan Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang merencanakan untuk memperluas tambak di sekitar habitat tuntong laut seluas 1.233 ha di Kecamatan Seruway dan 325 ha di Kecamatan Bendahara (DKP 2014). Demikian juga telah terjadi ekspansi perkebunan kelapa sawit di areal habitat tuntong laut seluas 1.013 ha milik PT Raya Padang Langkat dan 251,31 ha milik PT Bahari Lestari (Disbuntanak 2016). Selain itu, terjadi penebangan kayu mangrove di areal habitat tuntong laut sebagai bahan baku kayu arang.

Berdasarkan Friedman dan Miles (2006) setiap perbedaan kepentingan, kebutuhan, dan sudut pandang antar *stakeholder*, harus dikelola dengan baik agar tujuan dapat diwujudkan. Hermans dan Thiesen (2008) menyatakan bahwa setiap *stakeholder* memiliki kepentingan yang berbeda sehingga menyebabkan adanya kesenjangan informasi antar *stakeholder*. Konservasi tuntong laut tidak akan berhasil hanya dengan berbekal pengetahuan ekologi semata tetapi juga perlu didukung pengetahuan karakteristik *stakeholder*-nya.

Sering kali banyaknya *stakeholder* dengan kepentingan yang berbeda menyebabkan kegagalan upaya konservasi satwaliar di berbagai negara (Harteti *et al.* 2014; Jacobson dan Decker 2006; Riley *et al.* 2002). Dengan demikian, upaya konservasi tuntong laut yang komprehensif dan melibatkan berbagai *stakeholder* merupakan tindakan yang harus segera dilakukan untuk penyelamatan populasi tuntong laut. Upaya konservasi tuntong laut yang cukup berhasil dengan melibatkan berbagai *stakeholder* telah dilakukan di Malaysia. Konservasi tuntong laut di Malaysia dilakukan sejak awal tahun 1988 yang melibatkan unsur pemerintah pusat, LSM, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan masyarakat setempat.

Belum adanya penelitian terkait karakteristik setiap *stakeholder* dalam konservasi tuntong laut di Kabupaten Aceh Tamiang, penelitian ini lebih difokuskan pada penelaahan tugas pokok dan fungsi para *stakeholder* dalam konservasi tuntong laut. Pengaruh dan kepentingan dapat dipahami dari setiap perspektif para pemangku kepentingan terkait penerapan suatu program (Reed *et al.* 2009). Tujuan penelitian ini adalah: 1) mengidentifikasi *stakeholder*, 2) mengkategorikan *stakeholder*, dan 3) menggambarkan hubungan antar *stakeholder* dalam hubungannya dengan konservasi tuntong laut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2017 – Januari 2018. Kabupaten Aceh Tamiang dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan daerah penyebaran tuntong laut dan Pemda Kabupaten Aceh Tamiang merupakan satu-satunya Pemda yang telah membuat regulasi perlindungan tuntong laut secara lokal melalui keputusan bupati, peraturan bupati dan peraturan daerah. Objek penelitian adalah *stakeholder* yang terlibat dalam konservasi tuntong laut. Atribut yang ditelaah adalah pengaruh dan kepentingan *stakeholder* serta interkasinya dalam konservasi tuntong laut di Kabupaten Aceh Tamiang. Groenendijk (2003) menyatakan bahwa dalam analisis *stakeholder* atribut adalah kepentingan (*interests*) dan pengaruh (*influence*).

Jenis data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan kuesioner (wawancara tertutup) terhadap 86 responden. Sampling responden pada wawancara tertutup ini adalah seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam konservasi tuntong laut dan habitatnya. Pemilihan responden sebagai sumber dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pada pertimbangan tertentu bahwa orang tersebut dianggap paling tahu tentang data dan informasi apa yang diharapkan sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono 2012). Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data pengaruh dan kepentingan *stakeholder* terhadap konservasi tuntong laut dengan menggunakan skoring Skala Likert (1-5) yang dimodifikasi (Djaali 2008). Tingkat kepentingan dan pengaruh *stakeholder* dinilai berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan dan studi dokumen. Masing-masing elemen kepentingan dan pengaruh dinilai dengan interval sangat rendah sampai sangat tinggi dan dinyatakan dalam skor dengan kriteria seperti pada Tabel 1.

Data sekunder diperoleh melalui penelusuran dokumen terkait konservasi tuntong laut di Kabupaten Aceh Tamiang berupa laporan hasil kegiatan dan informasi kondisi umum penelitian. Jenis data dan metode pengumpulan data disajikan dalam Tabel 2.

Pada penelitian ini pengukuran tingkat kepentingan *stakeholder* dilakukan berdasarkan hak, kebutuhan, harapan, keinginan dan manfaat potensial yang dapat diperoleh *stakeholder* dari jasa tuntong laut dan habitatnya, meliputi: 1) jasa regulasi, 2) jasa habitat, 3) jasa produksi; 4) jasa informasi, serta 5) jasa *carrier* (de Groot *et al.* 2002). Tingkat pengaruh *stakeholder* diukur berdasarkan pada lima elemen kekuasaan, yaitu (Groenendijk (2003); Galbraith (1983) dalam Reed *et al.* (2009); Yukl (2005); Ribot dan Peluso (2003)) 1) kewenangan (*authority*) dalam pengambilan keputusan, 2) kekuasaan untuk menekan pihak lain (*coercive*), 3) kemampuan pengkondisian melalui manipulasi kepercayaan atau pembentukan opini, 4) kepemilikan ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga kerja, modal,

dan sumber daya strategis lainnya, dan 5) jejaring kerja sama (*networks*) yang dimiliki. Data konflik dan data komunikasi dikumpulkan melalui wawancara. Teknik ini digunakan untuk menjangkau data-data primer konflik dan komunikasi. Pada proses ini, peneliti mewawancarai informan-informan yang terlibat dalam konflik dan komunikasi dalam konservasi tuntong laut. Wawancara

dilakukan terhadap kedua belah pihak yang terlibat konflik dan komunikasi. Selain itu dilakukan penelusuran dokumen berupa nota kesepahaman yang terjadi di antara *stakeholder* dalam konservasi tuntong laut dan observasi secara langsung untuk mendapatkan data konflik dan komunikasi yang terjadi di antara *stakeholder*.

Tabel 1 Kriteria tingkat kepentingan dan pengaruh *stakeholder*

Skor	Kriteria	Keterangan
Tingkat kepentingan		
5	Sangat tinggi	Memiliki kepentingan terhadap 5 jasa tuntong laut dan habitatnya: jasa regulasi, jasa habitat, jasa produksi, jasa informasi, dan jasa <i>carrier</i>
4	Tinggi	Memiliki kepentingan terhadap 4 dari 5 tuntong laut dan habitatnya tersebut.
3	Cukup	Memiliki kepentingan terhadap 3 dari 5 tuntong laut dan habitatnya tersebut.
2	Rendah	Memiliki kepentingan terhadap 2 dari 5 tuntong laut dan habitatnya tersebut.
1	Sangat rendah	Memiliki kepentingan terhadap 1 dari 5 tuntong laut dan habitatnya tersebut.
Tingkat pengaruh		
5	Sangat tinggi	Memiliki 5 instrumen kekuasaan meliputi: kewenangan ( <i>authority</i> ) dalam pengambilan keputusan, kekuasaan untuk menekan pihak lain ( <i>coercive</i> ), kemampuan pengkondisian melalui manipulasi kepercayaan atau pembentukan opini, kepemilikan ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga kerja, modal, dan sumber daya strategis lainnya, dan jejaring kerja sama ( <i>networks</i> ).
4	Tinggi	Memiliki 4 dari 5 instrumen kekuasaan tersebut dalam konservasi tuntong laut.
3	Cukup	Memiliki 3 dari 5 instrumen kekuasaan tersebut dalam konservasi tuntong laut.
2	Rendah	Memiliki 2 dari 5 instrumen kekuasaan tersebut dalam konservasi tuntong laut.
1	Sangat rendah	Memiliki 1 dari 5 instrumen kekuasaan tersebut dalam konservasi tuntong laut.

Tabel 2 Jenis data dan metode pengumpulan data berdasarkan tujuan penelitian

No.	Tujuan penelitian	Data yang dikumpulkan	Metode pengumpulan data
1	Mendapatkan identitas <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam konservasi tuntong laut di Kabupaten Aceh Tamiang	Daftar dan identitas <i>stakeholder</i>	Penelusuran dokumen tupoksi dan wawancara
2	Mendapatkan kategori <i>stakeholder</i> dalam konservasi tuntong laut di Kabupaten Aceh Tamiang	Kepentingan dan pengaruh <i>stakeholder</i>	Wawancara
3	Menggambarkan hubungan antar <i>stakeholder</i>	Konflik dan komunikasi antar <i>stakeholder</i>	Wawancara, observasi langsung, dan penelusuran dokumen

Daftar *stakeholder* dianalisis dengan cara mengelompokkan *stakeholder* berdasarkan peranannya dalam masyarakat, sedangkan data kepentingan dan pengaruh *stakeholder* dianalisis dengan menggunakan matriks klasifikasi *stakeholder* untuk mendapatkan kategori *stakeholder key player*, *subject*, *context setter*, dan *crowd*.

Analisis berikutnya adalah analisis interaksi antar *stakeholder* yang dilakukan untuk mengetahui hubungan komunikasi, dan hubungan konflik antar *stakeholder* (Groenendijk 2003; Reed *et al.* 2009). Analisis tingkat komunikasi dan tingkat konflik dilakukan dengan menggunakan matriks komunikasi dan matriks konflik antar *stakeholder* yang terlibat dalam konservasi tuntong laut. Analisis jaringan kerja konservasi tuntong laut didasarkan atas frekuensi komunikasi/ koordinasi antar organisasi. Dalam hal ini, data frekuensi didikotomikan menjadi “komunikasi tinggi jika dilakukan minimal tiga kali setahun”, “komunikasi sedang jika dilakukan 2 kali setahun”, dan “komunikasi kecil jika dilakukan 1 kali

setahun”. Analisis dengan skenario ini menunjukkan kondisi riil jaringan kerja koordinasi konservasi tuntong laut. Analisis konflik dilakukan berdasarkan bentuk konflik yaitu konflik laten dan konflik mencuat. Konflik laten dicirikan adanya tekanan yang tidak tampak, belum terungkap ke puncak konflik dan salah satu pihak atau kedua belah pihak belum menyadari adanya konflik (Sembiring *et al.* 2010). Konflik laten dikategorikan konflik yang rendah sedangkan konflik mencuat dikategorikan konflik yang besar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Daftar dan Kepentingan *Stakeholder* Konservasi Tuntong Laut di Kabupaten Aceh Tamiang

Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 27 *stakeholder* yang terlibat dalam konservasi tuntong laut di Kabupaten Aceh Tamiang dan dapat dikelompokkan kedalam lima kelompok *stakeholder* yaitu instansi

pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, pemerintah desa dan *stakeholder* lainnya. Secara lengkap *stakeholder* dan minatnya dalam

konservasi tuntong laut di Aceh Tamiang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. *Stakeholder* dan minatnya dalam konservasi tuntong laut di Aceh Tamiang

No.	<i>Stakeholder</i>	Kepentingan ( <i>Interest</i> )
<b>Unsur Pemerintah Pusat</b>		
1.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	Berkepentingan dalam menetapkan tuntong laut sebagai satwa yang diprioritaskan tinggi untuk dikonservasi
2.	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	Berkepentingan dalam pengelolaan konservasi sumber daya ikan, penetapan kawasan konservasi perairan, pengawasan dan evaluasi
3.	Balai Konservasi Sumberdaya Aalam Aceh (BKSDA) Aceh	Berkepentingan dalam konservasi SDAH dan ekosistemnya di kawasan konservasi serta konservasi TSL di luar kawasan konservasi
<b>Unsur Pemerintah Provinsi</b>		
4.	Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Propinsi Aceh	Pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah, pengawasan dan evaluasi
5.	Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah III Aceh	Pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang pengelolaan hutan
<b>Unsur Pemerintah Kabupaten</b>		
6.	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Aceh Tamiang	Pelaksanaan bidang pertanian, sub urusan perkebunan dan sub urusan bidang peternakan
7.	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan (DPKP) Aceh Tamiang	Pelaksanaan pembangunan bidang ketersediaan, pengakeragaman, dan keamanan pangan, pembinaan nelayan dan produksi perikanan
8.	Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Aceh Tamiang	Berkepentingan dalam pelaksanaan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, sungai, pesisir dan laut.
9.	Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Berkepentingan dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan pembangunan daerah
10.	DPRD Kabupaten Aceh Tamiang	Berkepentingan dalam penetapan qanun perlindungan spesies tuntong laut
11.	TNI AL	Berkepentingan dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum
12.	Polsek Bendahara	Berkepentingan dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah Bendahara
13.	Polsek Seruway	Berkepentingan dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah Seruway
<b>Pemerintah Desa</b>		
14.	Desa Pusong Kapal	Berkepentingan dalam pengembangan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan di wilayahnya
15.	Desa Sungai Kurok III	Berkepentingan sebagai desa penyangga
16.	Desa Kuala Genting	Berkepentingan dalam pengembangan potensi SDA dan pelestarian lingkungan di wilayahnya
17.	Desa Kuala Penaga	Berkepentingan dalam pengembangan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan di wilayahnya
<b><i>Stakeholder</i> lain</b>		
18.	Pertamina Field Rantau	Berkepentingan dalam pelaksanaan kegiatan CSR kelestarian lingkungan
19.	Yayasan Satu Cita Lestari Indonesia	Berkepentingan dalam perlindungan, pengawetan, pemanfaatan tuntong laut
20.	Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	Berkepentingan dalam pemanfaatan tuntong laut sebagai objek wisata
21.	Pemungut telur tuntong laut	Berkepentingan dalam pemanfaatan telur tuntong laut
22.	Penangkap individu tuntong laut	Berkepentingan dalam pemanfaatan individu tuntong laut
23.	Pemilik tambak	Produksi ikan
24.	Pemilik dapur arang	Produksi arang
25.	Pemungut kayu arang	Mata pencaharian
26.	Pemilik kebun sawit	Produksi sawit
27.	Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Banda Aceh	Berkepentingan dalam penelitian

## 2. Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder

Nilai tingkat kepentingan dan pengaruh dari 27 *stakeholder* pada konservasi tuntong laut di Kabupaten Aceh Tamiang tersaji pada Tabel 4 dan Tabel 5. Hasil analisis klasifikasi *stakeholder* berdasarkan data dalam Tabel 4 dan Tabel 5 diperoleh empat kategori *stakeholder* (Gambar 1). *Key player* merupakan pihak dengan kepentingan dan pengaruh tinggi terhadap konservasi tuntong laut di Kabupaten Aceh Tamiang. Posisi ini ditempati oleh 7 *stakeholder* yaitu BKSDA Aceh, KPH Wilayah III Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Aceh, Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kab. Aceh Tamiang, Pertamina Field Rantau, Yayasan Satu Cita Lestari Indonesia, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Banda Aceh. Pihak ini memiliki pengaruh yang tinggi disebabkan memiliki kekuatan untuk memengaruhi pihak lain, salah satunya melalui kewenangan (*authority*) dalam pengambilan keputusan, kekuasaan untuk menekan pihak lain (*coercive*),

kemampuan pengkondisian melalui manipulasi kepercayaan atau pembentukan opini; kepemilikan ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga kerja, modal, dan sumber daya strategis lainnya; dan jejaring kerja sama (*networks*) yang dimiliki. Pelibatan *stakeholder key player* harus lebih aktif untuk mencapai keberhasilan tujuan konservasi tuntong laut.

*Subject* merupakan pihak dengan kepentingan tinggi namun pengaruhnya rendah. *Stakeholder* ini dasarnya merupakan pihak marjinal dan harus diberdayakan untuk mencapai tujuan konservasi tuntong laut. Pihak yang masuk kategori *subject* terdiri dari 13 *stakeholder* yaitu KLHK, KKP, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang, Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang, Dinas Perkebunan, Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang, DPRD Aceh Tamiang, Desa Pusong Kapal, Desa Sungai Kurok III, Desa Kuala Genting, Desa Kuala Penaga, Pokdarwis, pemungut telur dan penangkap individu tuntong laut.

Tabel 4 Tingkat kepentingan *stakeholder* terhadap konservasi tuntong laut

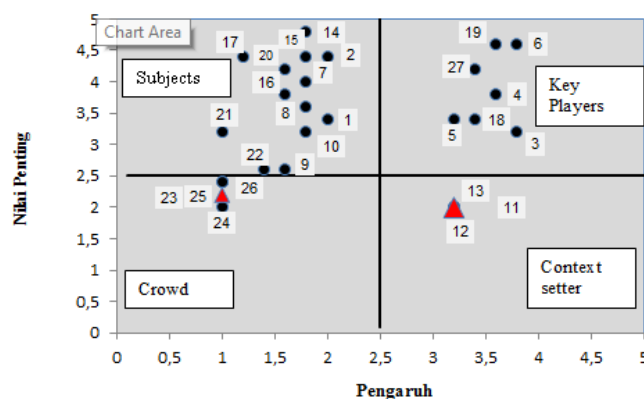
No.	Stakeholder	Kepentingan					Rata-rata
		K1	K2	K3	K4	K5	
1.	KLHK	4	4	3	3	3	3,4
2.	KKP	5	5	4	4	4	4,4
3.	BKSDA Aceh	3	5	4	2	2	3,2
4.	KPH Wilayah III Aceh	5	3	5	3	3	3,8
5.	DKP Prop. Aceh	4	4	3	3	3	3,4
6.	DPKP Kab. Aceh Tamiang	5	5	5	3	5	4,6
7.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang	5	5	2	3	5	4,0
8.	Bappeda Kab. Aceh Tamiang	4	3	3	3	5	3,6
9.	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab. Aceh Tamiang	1	1	5	1	5	2,6
10.	DPRD Kab. Aceh Tamiang	5	3	3	3	2	3,2
11.	Pos Pengamat TNI AL	2	2	2	2	2	2,0
12.	Polsek Kec. Bendahara	2	2	2	2	2	2,0
13.	Polsek Kec. Seruway	2	2	2	2	2	2,0
14.	Desa Pusong Kapal	5	4	5	5	5	4,8
15.	Desa Sungai Kurok	5	5	5	2	5	4,4
16.	Desa Kuala Genting	5	3	3	3	5	3,8
17.	Desa Kuala Penaga	5	4	5	3	5	4,4
18.	Pertamina Field Rantau	5	5	3	2	2	3,4
19.	Yayasan satu Cita Lestari Indonesia	5	5	3	5	5	4,6
20.	Kelompok sadar wisata	5	3	3	5	5	4,2
21.	Pemungut telur tuntong laut	3	3	3	3	4	3,2
22.	Penangkap individu tuntong laut	1	2	2	3	5	2,6
23.	Pemilik tambak	2	2	2	1	5	2,4
24.	Pemilik dapur arang	2	1	2	2	5	2,4
25.	Pengambil kayu arang	2	1	2	2	5	2,4
26.	Pemilik kebun sawit	2	1	2	1	5	2,2
27.	STIK Banda Aceh	5	5	4	5	2	4,2

Keterangan: K1 = jasa regulasi, K2 = jasa habitat, K3 = jasa produksi; K4= jasa informasi, K5 = jasa *carrier*

Tabel 5 Tingkat pengaruh *stakeholder* terhadap pelaksanaan konservasi tuntong laut di Kabupaten Aceh Tamiang

No.	Stakeholder	Pengaruh					Rata-rata
		P1	P2	P3	P4	P5	
1.	KLHK	1	1	3	2	3	2,0
2.	KKP	1	1	3	2	3	2,0
3.	BKSDA Aceh	3	2	4	3	3	3,0
4.	KPH Wilayah III Aceh	3	5	3	2	5	3,6
5.	DKP Prop. Aceh	3	3	4	3	4	3,4
6.	DPKP Kab. Aceh Tamiang	5	4	4	2	4	3,8
7.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang	2	1	3	1	2	1,8
8.	Bappeda Kab. Aceh Tamiang	2	1	2	1	3	1,8
9.	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab. Aceh Tamiang	1	1	1	1	3	1,4
10.	DPRD Kab. Aceh Tamiang	2	1	2	1	3	1,8
11.	Pos Pengamat TNI AL	5	2	3	1	5	3,2
12.	Polsek Kec. Bendahara	5	2	3	1	5	3,2
13.	Polsek Kec. Seruway	5	2	3	1	5	3,2
14.	Desa Pusong Kapal	2	2	2	1	2	1,8
15.	Desa Sungai Kurok	2	2	2	1	2	1,8
16.	Desa Kuala Genting	1	2	2	1	2	1,6
17.	Desa Kuala Penaga	1	1	2	1	1	1,2
18.	Pertamina Field Rantau	1	1	5	5	5	3,4
19.	Yayasan satu Cita Lestari Indonesia	1	3	5	4	5	3,6
20.	Kelompok sadar wisata	1	1	2	2	2	1,6
21.	Pemungut telur tuntong laut	1	1	1	1	1	1,0
22.	Penangkap individu tuntong laut	1	2	2	1	2	1,6
23.	Pemilik tambak	1	1	1	1	1	1,0
24.	Pemilik dapur arang	1	2	2	1	2	1,6
25.	Pengambil kayu arang	1	2	2	1	2	1,6
26.	Pemilik kebun sawit	1	2	2	1	2	1,6
27.	Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Banda Aceh	2	2	5	3	5	3,4

Keterangan: P1 = kewenangan (*authority*) dalam pengambilan keputusan, P2 = kekuasaan untuk menekan pihak lain (*coercive*), P3 = kemampuan pengkondisian melalui manipulasi kepercayaan atau pembentukan opini, P4 = kepemilikan ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga kerja, modal, dan sumber daya strageis lainnya, P5 = jejaring kerja sama (*networks*) yang dimiliki



Keterangan: Nomor dalam diagram: 1, 2, ....., 27 menunjukkan nomor *stakeholder* pada Tabel 3

Gambar 1 Matriks nilai penting dan pengaruh *stakeholder* konservasi tuntong laut di Kabupaten Aceh Tamiang

KLHK dan KKP merupakan pemerintah pusat dan memiliki kepentingan yang cukup tinggi dalam konservasi tuntong laut akibat tugas dan fungsi yang diemban oleh instansi tersebut. Kepentingan masyarakat

di keempat Desa penelitian sangat tinggi karena berkenaan dengan kepentingan ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Untuk menunjang keberhasilan konservasi tuntong laut, kelompok-kelompok dalam masyarakat ini

diberdayakan untuk melakukan aliansi dan membentuk sebuah institusi atau nota kesepahaman dalam pemanfaatan tuntong laut dan habitatnya sehingga lembaga ini nantinya akan memiliki posisi yang berpengaruh dalam konservasi tuntong laut di Kabupaten Aceh Tamiang.

*Context setter* merupakan *stakeholder* yang memiliki pengaruh tinggi namun kepentingan terhadap konservasi tuntong laut dan habitatnya sangat kecil. Pihak yang terdapat dalam *context setter* harus dikelola karena akan memberikan resiko terhadap keberhasilan konservasi tuntong laut. Pihak yang merupakan kelompok ini adalah TNI-AL, Polsek Kecamatan Seruway, dan Polsek Kecamatan Bendahara. Pihak ini dapat mempengaruhi pencapaian tujuan konservasi tuntong laut karena memiliki kelembagaan yang kuat dan kekuatan untuk memengaruhi pihak lain. TNI-AL, Polsek Kecamatan Seruway, dan Polsek Kecamatan Bendahara memiliki kewenangan untuk menegakan

hukum di wilayah hukumnya masing-masing terhadap para pelanggar hukum.

*Crowd* merupakan pihak dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah. Terdapat 4 pihak dalam posisi *crowd* yaitu pemilik tambak, pemilik dapur arang, pengambil kayu arang, dan pemilik kebun sawit. Pihak dalam kelompok ini perlu dipertimbangkan untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan sesuai kapasitas mereka

### 3. Hubungan Antar Stakeholder

#### a. Analisis komunikasi antar *stakeholder* konser-vasi tuntong laut

Analisis komunikasi antar *stakeholder* dilakukan dengan membuat matriks komunikasi seperti pada Gambar 2. Simbul bulatan menggambarkan adanya komunikasi dan ukuran bulatan menunjukkan intensitas komunikasi. Semakin besar bulatan semakin tinggi intensitas komunikasi (Euroconsult 1996).

Stakeholder	1	2	3	4	5	6	7	8
1		-	●	●	●	●	●	-
2	●		●	●	●	●	●	●
3	●	●		●	●	●	●	-
4	●	●	●		●	●	●	●
5	●	●	●	●		●	●	●
6	●	●	●	●	●		●	-
7	●	●	●	●	●	●		-
8	-	-	●	●	●	-	-	

Keterangan: 1:Pemerintah Pusat, 2:Pemerintah Propinsi, 3:Pemerintah Kabupaten, 4:Pemerintah Desa, 5: Masyarakat, 6: LSM, 7: Perusahaan, 8: Perguruan Tinggi, ●: adanya komunikasi, -: tidak ada komunikasi, ukuran ●: intensitas komunikasi rendah, ●: intensitas komunikasi sedang, ●: intensitas komunikasi tinggi.

Gambar 2 Intensitas hubungan komunikasi *stakeholder* konservasi tuntong laut.

Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini menggambarkan seberapa besar kerjasama yang terjadi di antara *stakeholder* yang terlibat dalam konservasi tuntong laut. Potensi bekerja sama teridentifikasi antara *stakeholder* karena memiliki tujuan dan harapan yang sama (Prasetya *et al.* 2017).

YSCI berkomunikasi dengan pemerintah pusat (BKSDA), pemerintah kabupaten (DPKP), Pemerintah Desa dan masyarakat (Desa Sungai Kurok III dan Desa Pusong Kapal). Komunikasi YSCI dan BKSDA sesuai surat No:PKS.03/BKSDA.9/2015 dan No. 06/III/SI/2015 meliputi perlindungan dan pengamanan, pengkajian, penelitian, pemantauan, survey populasi dan habitat dan pengadaan sarana prasarana pendukung

Komunikasi YSCI dengan Pemerintah propinsi (KPH wilayah III) yaitu survey populasi, pengamanan indukan dan telur. Komunikasi YSCI dengan DPKP yaitu survey populasi, pengamanan indukan dan telur,

sosialisasi qanun dan alat tangkap ikan ramah lingkungan. Komunikasi YSCI dengan DPRD yaitu mendorong lahirnya Qanun No.3 tahun 2016. Komunikasi YSCI dengan Pemerintah Desa Pusong Kapal dan Desa Sungai Kurok III yaitu pengembangan kapasitas pemerintah desa dalam konservasi tuntong laut. Komunikasi instruktif terjadi antara desa dengan masyarakat melalui penyuluhan.

Komunikasi Pemda Kabupaten (Bappeda dan DPKP) dengan DPKP Propinsi adalah inisiasi kawasan perlindungan habitat bertelur tuntong laut pada tahun 2015. Komunikasi KPH Wilayah III dengan Pemerintah Desa Pusong Kapal adalah kerjasama pengelolaan mangrove meliputi pengamanan, pemanfaatan, perlindungan dan pemanfaatan. Komunikasi STIK dengan DPKP yaitu tukar menukar hasil penelitian, mendorong lahirnya Peraturan dan Keputusan Bupati Aceh Tamiang tentang perlindungan tuntong laut.

### b. Analisis Konflik antar *Stakeholder*

Konflik konservasi tuntong laut di Kabupaten Aceh Tamiang terjadi dalam berbagai bentuk (Gambar 3). Semakin besar bulatan semakin tinggi intensitas konflik

(Grimble *et al.* 1995). Konflik pada umumnya bentuk laten yaitu tekanan tidak tampak, belum terungkap ke puncak konflik dan salah satu pihak atau kedua belah pihak belum menyadari adanya konflik (Sembiring *et al.* 2010).

Stakeholder	1	2	3	4	5	6	7	8
1		-	-	-	-	-	-	-
2	-		●	●	●	●	-	-
3	-	●		●	●	●	-	-
4	-	●	●		-	-	●	-
5	-	●	●	-		-	●	-
6	-	●	●	-	-		-	-
7	-	-	-	●	-	-		-
8	-	-	-	-	-	-	-	

Keterangan: 1: Pemerintah Pusat, 2: Pemerintah Propinsi, 3: Pemerintah Kabupaten, 4: Pemerintah Desa, 5: Masyarakat, 6: LSM, 7: Perusahaan, 8: Perguruan Tinggi, ●: adanya konflik, -: tidak ada konflik, ukuran ●: intensitas konflik rendah, ●: intensitas konflik besar

Gambar 3 Intensitas konflik *stakeholder* konservasi tuntong laut

Konflik latent terjadi antara Pokdarwis dengan masyarakat Desa Sungai Kurok III. Masyarakat Desa Sungai Kurok III merasakan kesenjangan ekonomi. Kehidupan ekonomi Pokdarwis di Desa Pusong Kapal lebih baik sejak dilibatkan dalam konservasi tuntong laut yang didanai Pertamina. Sarana di Desa Pusong Kapal lebih lebih baik seperti jalan dan rumah informasi tuntong. Masyarakat Desa Sungai Kurok III beranggapan ada tujuan eksplorasi minyak di pesisir. Konflik mencuat antara DPKP dengan Pemerintah Desa.

### 4. Implikasi Kebijakan

Masyarakat merupakan *stakeholder* yang memiliki nilai penting tinggi dan pengaruh rendah. Nilai penting yang tinggi bagi masyarakat karena konservasi tuntong laut mempengaruhi kegiatan ekonomi mereka. Pengaruh yang rendah disebabkan kapasitas masyarakat yang masih rendah. Oleh karena itu, kebijakan konservasi tuntong laut yang diperlukan adalah melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Seluruh *stakeholder key player* perlu dilibatkan pada seluruh tahapan kegiatan konservasi agar memberikan keyakinan kepada mereka bahwa keberhasilan konservasi tuntong laut adalah atas dukungan mereka. Bryson (2003) mengatakan bahwa ketidakefektifan pengelolaan sumberdaya diakibatkan oleh tidak optimalnya peran *stakeholder* penentu kebijakan. Berdasarkan analisis kategori dan hubungan antar *stakeholder*, penguatan peran *stakeholder* konservasi tuntong laut di Kabupaten Aceh Tamiang adalah dengan cara meningkatkan peran dan komunikasi

antara *stakeholder subject* dengan *stakeholder key player*, kolaborasi dan koordinasi di antara seluruh *stakeholder key player*, partisipasi seluruh *stakeholder key player* dan pemberdayaan untuk meningkatkan partisipasi *stakeholder* dan masyarakat.

Peningkatan peran dan komunikasi artinya terjadinya pertukaran informasi yang jelas antar *stakeholder key player* tentang konservasi tuntong laut. *Stakeholder* pemerintahan harus melakukan sosialisasi kegiatan terhadap *stakeholder* lainnya. Penguatan peran dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dan *stakeholder subject*. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga dapat berpartisipasi dalam konservasi tuntong laut. Tujuan pemberdayaan *subject* adalah meningkatkan pengaruhnya dalam konservasi tuntong laut.

Koordinasi merupakan jenis partisipasi yang dilakukan oleh *stakeholder key player* dengan kegiatan di antaranya penetapan aturan main, penyusunan agenda, pengorganisasian, penelitian, penentuan pilihan, dan pencapaian kesepakatan.

Kolaborasi yaitu pembagian peran dan kerjasama di dalam konservasi tuntong laut. Partisipasi pemerintah dalam kolaborasi adalah berperan dalam mensinergikan kegiatan-kegiatan konservasi tuntong laut di Kabupaten Aceh Tamiang. Pemberdayaan dilakukan secara kolaboratif di antara *stakeholder key player* dalam semua fungsi manajemen dan pendanaan (Tabel 6). Keberadaan Perguruan Tinggi dinilai mampu melakukan transfer pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat.



Tabel 6. Matriks partisipasi *stakeholder key player* dalam pemberdayaan

Fungsi-fungsi manajemen	Key player									
	BKS	KPH	DKP	DPK	PTM	YSL	STI	TSA	CHZ	AUZ
Perencanaan	√	√	√	√		√				
Pengorganisasian				√		√				
Pelaksanaan	√	√	√	√	√	√				
Pengawasan	√		√							
Pemantauan	√						√			
Evaluasi	√		√				√			
Pendanaan					√			**	**	**

Keterangan: BKS (Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh), KPH (KPH Wilayah III Aceh), DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Aceh), DPK (Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Aceh tamiang), PTM (Pertamina EF Rantau), YSL (Yayasan Satu Cita Lestari Indonesia), STI (Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Banda Aceh), TSA (Turtle Survival Alliance), CHZ (Chester Zoo), AUZ (Australia Zoo), \*\*: penyandang dana internasional bagi YSCI

## SIMPULAN

Teridentifikasi 27 *stakeholder* yang terlibat dalam konservasi tuntong laut di Kabupaten Aceh Tamiang. Jumlah *stakeholder* yang termasuk kategori *subjek* merupakan yang terbanyak, yaitu sebanyak 13 *stakeholder*; disusul oleh *stakeholder key player* sebanyak 7 *stakeholder*. Kategori *stakeholder key players* terdiri atas BKSDA, KPH Wilayah III, DKP Propinsi Aceh, DPK Kabupaten Aceh Tamiang, Pertamina Field Rantau, YSCI dan STIK. Kategori *stakeholder context setter* terdiri atas 3 *stakeholder*, yaitu TNI-AL, Polsek Seruway, dan Polsek Bendahara. Kategori *stakeholder crowds* terdiri atas 4 *stakeholder*, yaitu pemilik tambak, pemilik dapur arang, pengambil kayu arang, dan pemilik kebun sawit. Kategori *stakeholder subjects* terdiri atas 13 *stakeholder*, yaitu KLHK, KKP, DLH Kabupaten Aceh Tamiang, Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang, Distanbunak, DPRD Kabupaten Aceh Tamiang, Desa Pusong Kapal, Desa Sungai Kurok III, Desa Kuala Genting, Desa Kuala Penaga, Pokdarwis, Pemungut telur dan Penangkap individu tuntong laut. *Stakeholder key player* perlu bekerja secara kolaboratif dalam konservasi tuntong laut dan pemberdayaan masyarakat.

Konflik antara *stakeholder* bersifat latent dan mencuat yang disebabkan kurangnya komunikasi dan keterlibatan *stakeholder*. Berdasarkan tingkat komunikasi antara *stakeholder* teridentifikasi adanya komunikasi yang bersifat instruktif, konsultatif, dan kooperatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bryson JM. 2003. *What To Do When Stakeholders Matter: A Guide To Stakeholder Identification and Analysis Techniques*. National Public Management Research The Georgetown University. Washington DC (US): Public Policy Institute
- de Groot RS, Wilson MA, Boumans RMJ. 2002. A typology for the classification, description and valuation of ecosystem functions, goods and services. *Ecological Economics*. 41(3): 393-408

- Djaali. 2008. *Skala Likert*. Jakarta (ID): Pustaka Utama.
- [Disbuntanak] Dinas Perkebunan, Pertanian, dan Peternakan Aceh Tamiang. 2016. *Rencana Kerja Dinas Perkebunan, Pertanian, dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014*. Aceh Tamiang (ID): Dinas Perkebunan, Pertanian, dan Peternakan Aceh Tamiang.
- [DKP] Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tamiang. 2014. *Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2014*. Aceh Tamiang (ID): Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tamiang
- Euroconsult. 1996. *Coastal Wetlands Protection And Development, South Mekong Delta, project preparation*. Final Report
- Friedman A, Miles S. 2006. *Stakeholder, Theory and Practice*. Oxford (US): Oxford University Press.
- Grimble R, Chan, MK, Aglionby, Quan J. 1995. *Trade-offs: A Stakeholders Approach to Natural Resource Management*. London (GB): International Institute for Environment and Development.
- Groenendijk L. 2003. *Planning and Management Tools*. Enschede (NL): The International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (ITC).
- Harteti S, Basuni S, Masyud B, Yulianda F. 2014. Peran para pihak dalam pengelolaan kawasan konservasi penyu pangumbahan. *Jurnal Analisis Kebijakan*. 11(2):145-162.
- Hermans LM, Thiessen WAH. 2008. Actor analysis methods and their use for public policy analysis. *European Journal of Operational Research*. 196: 808-818. doi:10.1016/j.ejor. 2008.03.040.
- [IUCN] International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. 2014. IUCN Red List of Threatened Species. Gland (SW): IUCN [diunduh 2014 Des 12]. Tersedia pada <http://www.iucnredlist.org>.
- Jacobson CA, Decker DJ. 2006. Ensuring the future of state wildlife management: understanding challenges for institutional change. *Wildlife Society Bulletin*. 34(2): 531-536.

- Prasetia DA, Hardjanto, Hero J. 2017. Analisis pemangku kepentingan dalam pola kemitraan dan pola swadaya pada pengelolaan hutan rakyat. *Media Konservasi*. 22(3): 293-303
- Reed MS, Graves A, Dandy N, Posthumus H, Huback K, Morris J, Prell CH, Quin CH, Stringer LC. 2009. Who's in and why? A typology of *stakeholder* analysis methods for natural resources management. *Journal of Environmental Management*. 90:1933-1949. doi:10.1016/j.jenvman.2009.01.001.
- Ribot JC, Peluso NL. 2003. A theory of access. *Rural Sociology*. 68(2):153-181.
- Riley SJ, Daniel JD, Len HC, John FO, William FS, George FM, Gary P. 2002. The essence of wildlife management. *Wildlife Society Bulletin*. 30(2): 585-593.
- Sembiring E, Basuni S, Soekmadi R. 2010. Resolusi konflik pengelolaan Taman nasional Teluk Cendrawasih di Kabupaten Teluk Wondana. *JMHT*. 16(2): 84-91
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung (ID): Alfabeta
- Van Dijk PP, Stuart BL, Rhodin AGJ. 2000. Asian turtle trade: proceedings of a workshop on conservation and trade of freshwater turtles and tortoises in Asia. Executive Summary. *Chel.Res.Monogr*. 3(2): 13-14.
- Yukl GA. 2005. *Kepemimpinan dalam Organisasi*. Supriyanto B, penerjemah. Tanya E, editor. Jakarta (ID): Penerbit Indeks. Terjemahan dari: *Leadership in Organization*. Ed ke-5.